



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**

## SERTIFIKAT

Nomor : 002022/UN38.4/TU/2016

Kepada :

**Dr. H. PURWANTA, M.A**

Sebagai

**PEMAKALAH**

dalam kegiatan **Seminar Nasional dengan tema "Revitalisasi Kearifan Lokal untuk Membangun Martabat Bangsa"**  
**mengapresiasi 50 tahun Pengabdian Prof. Dr. Aminuddin Kasdi, MS. kepada ilmu, tugas, persahabatan, dan pembelajaran sejarah yang bermartabat**  
yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
pada hari Sabtu, 21 Mei 2016 bertempat di Ruang Srikandi (Gedung I6) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Surabaya, 21 Mei 2016



Mengetahui,  
Dekan,

**Prof. Dr. Sarmini, M.Hum.**  
NIP 196808081993032002



**Drs. Sumarno, M.Hum.**  
NIP 196504241993021001

# Prosiding

Seminar Nasional  
Surabaya, 21 Mei 2016

## *Revitalisasi Kearifan Lokal untuk Membangun Martabat Bangsa*

**MENGAPRESIASI 50th PENGABDIAN Prof. Dr. AMINUDDIN KASDI, M.S.  
KEPADA ILMU, TUGAS, PERSAHABATAN, DAN PEMBELAJARAN SEJARAH YANG BERMARTABAT**



Prosiding Seminar Nasional

**REVITALISASI KEARIFAN LOKAL  
UNTUK MEMBANGUN MARTABAT BANGSA**

*Mengapresiasi 50thn pengabdian Prof. Dr. Aminuddin Kasdi, M.S.  
Kepada ilmu, tugas, persahabatan, dan pembelajaran sejarah yang bermartabat*

*Surabaya, 21 Mei 2016*

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prosiding Seminar Nasional

**REVITALISASI KEARIFAN LOKAL  
UNTUK MEMBANGUN MARTABAT BANGSA**

*Mengapresiasi 50thn pengabdian Prof. Dr. Aminuddin Kasdi, M.S.  
Kepada ilmu, tugas, persahabatan, dan pembelajaran sejarah yang bermartabat*

*Surabaya, 21 Mei 2016*

Diselenggarakan Oleh:  
Jurusan Pendidikan Sejarah FISH UNESA  
bekerjasama dengan  
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur  
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Jawa Timur

## **REVITALISASI KEARIFAN LOKAL UNTUK MEMBANGUN MARTABAT BANGSA**

Diterbitkan Oleh:

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email: unipressunesa@yahoo.com

unipress@unesa.ac.id

Penyunting : Sumarno

Layout : Riyadi

Desain cover : Eko Satriya Hermawan

Cetakan I,

ISBN: 978-979-028-855-3

424 hal + ix

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

@ All right reserved

## PENGANTAR

Salah satu problem yang saat ini dihadapi oleh Indonesia adalah memertahankan karakter bangsa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Karakter bangsa pada dasarnya bisa dibangun melalui ranah pendidikan yakni dengan cara menekankan pada pendidikan karakter serta menanamkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Oleh sebab itu, kebijakan dan implementasi pendidikan yang berbasis karakter menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun bangsa ini.

Indonesia memiliki nilai-nilai dari kearifan lokal yang dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pembangunan karakter. Denny Lombard dalam karyanya *Nusa Jawa Silang Budaya* menjelaskan bahwa pergerakan budaya adalah saling silang seperti kata kerja yang terus berdinamika dengan perkembangan zaman. Dinamika itu semakin meneguhkan pentingnya kearifan lokal yang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai penyaring nilai-nilai yang berasal dari luar. Kearifan lokal juga dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan dan hambatan dalam dinamika perjalanan historis bangsa dan negara dalam tatanan dunia dalam era globalisasi saat ini.

Sejarah menunjukkan, masyarakat Indonesia yang terbentng dari Sabang sampai Merauke memiliki kearifan lokal masing-masing. Kearifan lokal itu, tentu saja tidak muncul serta-merta, tapi berproses panjang sehingga akhirnya terbukti, hal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat itu pun menjadi budaya yang mentradisi, melekat kuat pada kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi globalisasi, maka masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati diri sendiri melalui pemaknaan kembali mapuun revitalisasi terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Dalam kerangka itu, upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna substantif kearifan lokal untuk membangun bangsa dan negara ini agar menjadi bermartabat. Serbuan budaya asing dalam proses silang budaya begitu cepat seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi. Dalam hal ini, revitalisasi kearifan lokal menjadi relevan. Anak bangsa di negeri ini sudah sewajarnya mengenal nilai-nilai luhur bangsanya yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya dalam mengarungi tantangan zaman.

Artikel yang berjumlah kurang lebih empat puluhan ini, merupakan pemikiran anak bangsa yang telah diseminarkan dalam bentuk *call paper* dalam rangka penghormatan kepada Prof. Dr. Aminuddin Kasdi MS., yang telah mengabdikan diri kepada ilmu, tugas, persahabatan dan pemebelajaran sejarah yang bermartabat selama 50 tahun. Paling tidak, terdapat empat sub tema yang menjadi titik tekan pembahasan, yakni membangun karakter bangsa dalam lintas budaya, menjaga NKRI dari gerakan ekstrim kanan dan kiri, menjadikan bangsa Indonesia yang bermartabat, dan akulturasi budaya dalam perspektif sejarah Indonesia.

Upaya revitalisasi kearifan lokal di Indonesia melalui sumbangan pemikiran ini, tidak lain adalah didasari oleh keinginan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia agar lebih bermartabat dalam dunia yang semakin mengglobal. Ke depan, kita semua berharap kumpulan artikel yang telah disusun menjadi sebuah prosiding ini bisa memberikan sumbangsih berarti dalam proses pembangunan bangsa.

Surabaya,  
a.n. Panitia Seminar Nasional

R.N. Bayu Aji

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Pengantar.....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>PENGUATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN INDONESIA YANG BERMARTABAT MELALUI TANGGUNG JAWAB SOSIAL MASYARAKAT.....</b>	<b>1</b>
<i>Oleh</i> : Siti Maizul Habibah	
<b>TELAAH INTEGRATIF GEOGRAFI KESEJARAHAN.....</b>	<b>9</b>
<i>Oleh</i> : Sukma Perdana Prasetya	
<b>MENYOAL KEINDONESIAAN DALAM BUKU PELAJARAN SEJARAH.....</b>	<b>16</b>
<i>Oleh</i> : H. Purwanta	
<b>BERTAHAN DI TENGAH GEMPURAN BUDAYA GLOBAL: KEARIFAN LOKAL SAMIN SEBAGAI MODAL BUDAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA.....</b>	<b>27</b>
<i>Oleh</i> : Eko Crys Endrayadi	
<b>MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DALAM LINTAS BUDAYA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL.....</b>	<b>33</b>
<i>Oleh</i> : I Made Suwanda	
<b>PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TERPADU TIPE <i>CONNECTED</i> PADA PEMBELAJARAN IPS DENGAN PENDEKATAN BERBASIS MASALAH PADA TOPIK DAMPAK EKSPLOITASI MINYAK BUMI TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWAKELAS VIII SMP N 2 TARAKAN.....</b>	<b>43</b>
<i>Oleh</i> : Musdinah, Aminuddin Kasdi, Ketut Prasetya	
<b>SASTRA NUSANTARA DAN MARTABAT BANGSA DALAM PERSPEKTIF LIAW YOCK FANG....</b>	<b>51</b>
<i>Oleh</i> : Yudi Prasetyo	
<b>ANALISIS MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darut Taqwa Purwosari Pasuruan).....</b>	<b>59</b>
<i>Oleh</i> : Aulia Fitriany, Franciscus Xaverius Wartoyo	
<b>MENEBAHKAN IDENTITAS KEINDONESIAAN GENERASI MUDA MELALUI SEKOLAH.....</b>	<b>71</b>
<i>Oleh</i> : Oksiana Jatningsih	
<b>PENGEMBANGAN MODEL KOMPREHENSIF PENGUATAN NILAI INTEGRITAS MAHASISWA UNTUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA).....</b>	<b>81</b>
<i>Oleh</i> : Sarmini, Hestin Sri Widiawati	
<b>HIDUP "HARMONI" DI UJUNG TIMUR PULAU JAWA: Studi tentang Relasi antar Kelompok Umat Beragama di Kec. Glemore, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur.....</b>	<b>93</b>
<i>Oleh</i> : Martinus Legowo, FX Sri Sadewo, Zainuddin Maliki dan Farid Pribadi	



<b>ARTI HISTORIS PRASASTI PATAKAN DALAM JEJAK AIRLANGGA DI LAMONGAN.....</b>	103
<i>Oleh</i> : Eviana	
<b>KAJIAN SUMBER AIR PANAS BRUMBUN DALAM PERSPEKTIF GEOLOGI, SERTA PENGARUHNYA TERHADAP BUDAYA MASYARAKAT.....</b>	123
<i>Oleh</i> : Indra Agung Pamuja, Pradika Adi Wijayanto	
<b>KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL SOSIAL UNTUK MEMBANGUN BANGSA.....</b>	131
<i>Oleh</i> : Ari Wahyudi	
<b>PEREMPUAN DALAM PRAKTEK KEARIFAN LOKAL: ANTARA TRADISI DAN DISKRIMINASI....</b>	139
<i>Oleh</i> : Refli H. Listyani, Diyah Utami	
<b>AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MENUNJUKKAN MARTABAT BANGSA .....</b>	155
<i>Oleh</i> : Listyaningsih	
<b>AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA TRADISI BUDAYA TETAKEN DI PACITAN...</b>	163
<i>Oleh</i> : Heru Arif Pianto	
<b>INTEGRASI NASIONAL DALAM PUSARAN GLOBALISASI.....</b>	171
<i>Oleh</i> : Sugeng Harianto	
<b>PERKEMBANGAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMBANGUN BANGSA INDONESIA BERMARTABAT.....</b>	183
<i>Oleh</i> : Rahmani Wijaya	
<b>RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI JAWA TIMUR: SEBUAH TINJAUAN AWAL.....</b>	191
<i>Oleh</i> : Moh. Mudzakkir, Arief Sudrajat	
<b>URGENSI PENEGAKAN HAM UNTUK MENJAGA MARTABAT BANGSA</b>	201
<i>Oleh</i> : Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	
<b>PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENGELOLA KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI PEDESAAN.....</b>	211
<i>Oleh</i> : Katon Galih Setyawan, Ali Imrom	
<b>REVOLUSI MENTAL MELALUI PENDIDIKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL BUDAYA JAWA</b>	217
<i>Oleh</i> : Agus Trilaksana, Sudarmiani.....	
<b>DARI KESELARASAN MENUJU KEKUASAAN: JELAJAH GENEALOGI ASTABRATA DALAM MASYARAKAT JAWA.....</b>	231
<i>Oleh</i> : Nur Fatah Abidin, Hermanu Joebagio, Sariyatun	
<b>NASIONALISME UNTUK MEMBANGUN NEGERI NKRI.....</b>	245
<i>Oleh</i> : Agus Machfud Fauzi	
<b>MEMBANGUN KARAKTER BERORIENTASI KEMARITIMAN.....</b>	251
<i>Oleh</i> : Nugroho Hari Pumomo	

## MENYOAL KEINDONESIAAN DALAM BUKU PELAJARAN SEJARAH

Oleh:  
H. Purwanta\*\*

### Abstrak

*"He who controls the past controls the future, and he who controls the present controls the past" George Orwell*

---

\*\*H. Purwanta, Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Email: purwanta@gmail.com

### A. Jejak dalam Historiografi Pendidikan

Secara alamiah, tujuan pendidikan sejarah ada dua, yaitu mewariskan identitas serta menjaga kerukunan (kohesivitas) dan kemajuan (progresivitas) masyarakat. Dengan menggunakan konteks tujuan pendidikan sejarah di India, Kochhar (2008: 27-28) menggambarkan sebagai berikut:

*Mengembangkan kesadaran diri: Sejarah perlu diajarkan untuk mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri. Untuk mengetahui siapa diri kita sendiri, diperlukan perspektif sejarah. Minat khusus dan kebiasaan yang menjadi ciri khas seseorang merupakan hasil interaksinya di masa lampau dengan lingkungan tertentu. Setiap orang memiliki warisan yang unik, kombinasi antara tradisi ras, suku, kebangsaan, keluarga dan individu, yang terpadu menjadikan dirinya seperti sekarang ini. Tanpa pendalaman terhadap faktor-faktor sejarah tersebut, orang akan gagal memahami identitasnya sendiri.*

*Tanpa sejarah, bangsa India tidak akan tahu apa artinya menjadi orang India. Para politikus pun tidak akan sungguh-sungguh memahami untuk apa mereka menjadi pegiat partai dan transformasi apa yang sedang dilakukan oleh partainya. Tanpa sejarah, anak-anak sekarang tidak akan tahu kegigihan perjuangan yang dilakukan oleh para pemimpin nasional untuk memperoleh kemerdekaan dan peran yang besar dari masing-masing tokoh pada zamannya dalam memperjuangkan kemerdekaan.*

Sesuai dengan perkembangan zaman, terutama sejak bangsa Barat mendominasi dunia, tujuan kurikulum pendidikan sejarah menjadi tiga, yaitu ditambah dengan pengembangan keterampilan akademik, yaitu berpikir rasional dengan didukung data empirik, yang merupakan identitas bangsa Barat.

Pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, dua tujuan pelajaran sejarah pertama memperoleh perhatian besar. Penetapan Budi Utomo sebagai awal kebangkitan nasionalisme Indonesia, Majapahit dan Sriwijaya sebagai dua kerajaan hebat di masa lampau, dan pertempuran arek-arek Surabaya sebagai hari pahlawan merupakan beberapa contoh tindakan pemerintah menggunakan sejarah untuk

membangun identitas nasional yang terjadi pada periode ini. Langkah itu dilakukan agar masyarakat bangga sebagai warga bangsa Indonesia merdeka.

Selain sebagai alat untuk nation building, pelajaran sejarah juga difungsikan sebagai pendorong kemajuan masyarakat. Pada perayaan ulang tahun Taman Siswa, Presiden Soekarno (1965) menjelaskan:

*Mempelajari sedjarah koeno dan mengkagoemi sedjarah koeno itoe hanjalah ada boeahnja yang berfaedah bagi masjarakat kita yang sekarang, djikalau kita menarik teroes garisnja dynamic yang ada di dalam sedjarah itoe. Dari tingkatnja kita poenja "grootsch verleden" (red: kebesaran masa lampau) melaloei tingkatnja kita poenja "donkerheden" (red: masa kegelapan), mendaki kepada tingkatnja kita poenja "lichtende werkende toekomst" (red: masa depan yang gemilang) dengan melaloei tingkat-tingkat inilah si goeroe haroes dapat menjelmakan garis sedjarah itoe di dalam garis hidoepnja, nafasnja djiwa sendiri. Levenslijn-nja Historie haroeslah ia djelmakan di dalam ia poenja geestelijke levenslijn (red: garis kehidupan rohaniah) sendiri, manakala ia benar-benar maoe bernama Poetera-Zaman, Rasool Kebangoenan.*

Pada zaman pemerintah Presiden Suharto, terutama sejak kurikulum 1975, penekanan tujuan pelajaran sejarah bergeser ke pengembangan akademik dan legitimasi kekuasaan. Paling tidak ada dua kelompok kekuasaan yang menggunakan sejarah untuk membangun legitimasi kekuasaan. Kelompok pertama adalah kelompok Orde Baru yang berinti Angkatan Darat. Kelompok itu membutuhkan narasi sejarah yang melayakpantaskan eksistensi militer di panggung politik Indonesia. Pada Seminar TNI-Angkatan Darat ke 3 tahun 1972, dihasilkan rekomendasi untuk menyusun dan mengedarkan sejarah versi militer kepada masyarakat Indonesia pada umumnya (McGregor, 2008: 249). Istilah yang dimunculkan dan populer di masyarakat untuk "sejarah versi militer" adalah pewarisan "semangat dan nilai 1945" atau "nilai perjuangan".

Usaha menampilkan "sejarah versi militer" tampak pada penyusunan Sejarah Nasional Indonesia jilid VI yang menguraikan jasa-jasa militer di Indonesia yang menjadi buku induk bagi buku teks pelajaran sejarah, terutama SMP dan SMA. Bahkan melalui kurikulum 1984, usaha legitimasi kelompok militer dilakukan dengan menambah satu mata pelajaran baru, yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Untuk pelaksanaan mata pelajaran PSPB tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 290a/U/1985 tanggal 8 Juli 1985 dan No. 216/C/Kep/1985 tanggal 7 November 1985 yang berisi tentang pelaksanaan mata pelajaran PSPB dan GBPP PSPB. Selain melalui dunia pendidikan, penyebaran "sejarah versi militer" juga menggunakan sarana yang lain. Baik secara pribadi maupun kelembagaan, kelompok militer juga menyusun buku-buku memoar, film, museum, dan monumen untuk menunjukkan peran besar mereka dalam dinamika sejarah Indonesia.

Kelompok ke dua adalah pendukung modernisme yang berinti kaum intelektual dan teknokrat. Kelompok itu berkeyakinan bahwa Indonesia harus berkembang menjadi modern, dalam arti negara industri seperti Barat. Mereka ingin mengubah mentalitas masyarakat Indonesia menjadi berbudaya Barat (rasional dan empirik). Untuk sejarawan yang masuk kelompok ini, oleh Sutherland dinamakan sebagai Sejarawan Profesional Modern (SPM). Dalam dunia sejarah, usaha perubahan itu dilakukan dengan "menampilkan sejarah sebagai kemajuan yang berpuncak pada kejayaan modernitas negara-bangsa, yaitu cara berpikir atau cara hidup Barat" serta eksplanasi teleologis yang berpuncak pada terbentunya masyarakat yang oleh Francis Fukuyama disebut sebagai demokrasi pasar bebas (Sutherland, 2008: 34-35). Pada tingkat praksis, karakteristik historiografis kelompok itu adalah kuatnya narasi yang menempatkan Barat sebagai kekuatan determinan dalam sejarah Indonesia, seperti tertuang pada Sejarah Nasional Jilid IV dan V. Pada buku teks

pelajaran sejarah, pemikiran dan kepentingan mereka tertuang dalam topik penjajahan Barat. Bahkan pada kurikulum 1994, cengkeraman kepentingan SPM semakin kuat melalui perluasan pengaruh kekuasaan Barat di Indonesia. Dinarasikan dalam buku teks pelajaran sejarah bahwa pengaruh tidak hanya datang dari kaum kolonialis Belanda, tetapi kebudayaan Barat pada umumnya. Hal itu tampak pada munculnya topik "*Pengaruh paham-paham baru dari Eropa-Amerika terhadap nasionalisme di Asia-Afrika*", "*Pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme Asia-Afrika*", dan "*Pengaruh dua perang dunia terhadap dunia internasional, khususnya kemerdekaan bangsa Asia-Afrika dan Indonesia*" dalam buku teks pelajaran sejarah.

Reformasi tahun 1998 tidak banyak membawa perubahan yang berarti, baik pada tujuan maupun materi pelajaran sejarah. Pada KTSP tahun 2006, cerita tentang hebatnya peran militer pada periode revolusi masih tetap tertulis pada buku teks pelajaran sejarah. Begitu pula dengan penempatan Barat sebagai kekuatan determinan. Dua masalah yang menonjol selama zaman reformasi adalah hilangnya topik tentang keberhasilan pembangunan oleh Orde Baru dan penulisan G30S/PKI. Topik keberhasilan pembangunan diganti dengan berbagai permasalahan yang menggagalkannya, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme serta gerakan mahasiswa yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Pada kurikulum 2004 kata PKI di belakang G30S dihilangkan, tetapi mengakibatkan gejolak di masyarakat, terutama muslim garis keras dan kelompok pendukung militer. Mereka melakukan aksi kekerasan, seperti pembakaran buku teks pelajaran sejarah. Bahkan kemudian langkah itu dilegalkan oleh SK Kejaksaan Agung No. 019/A-JA/10/2007 tertanggal 5 Maret 2007 tentang penarikan buku sejarah kurikulum 2004. Akibatnya kata "PKI" kembali muncul di belakang G30S.

Dari perjalanan panjang sejak zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi, terlihat jelas bahwa sejarah menjadi mata pelajaran yang menonjolkan keunggulan budaya Barat dan kaum

militer. Problem yang mengemuka dari narasi yang menjadikan Barat sebagai kekuatan determinan dalam dinamika sejarah Indonesia adalah generasi muda yang “sok kebarat-baratan”. Mereka berpenampilan meniru orang Barat (menurut persepsi mereka) dengan rambut dicat pirang, makan fastfood dan menempatkan bahasa Inggris sebagai lebih bergengsi dari pada bahasa lokal dan nasional. Terhadap Indonesia sendiri, atau dalam tulisan ini digunakan istilah keindonesiaan, terjadi gejala semakin pudarnya rasa memiliki (*sense of belonging*). Dari wawancara terhadap pelajar, ditemukan kecenderungan bahwa sebagian besar mereka menempatkan Indonesia hanya sebagai fakta geografis, yaitu tempat lahir dan tinggal (*Jakarta Post*, 16 Agustus 2002). Bahkan Gismar (2008: 204), melalui survey terhadap mahasiswa di Jakarta menemukan bahwa generasi muda memandang Indonesia sebagai masyarakat yang cenderung negatif. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa generasi muda kurang memiliki kebanggaan terhadap bangsanya sendiri.

Permasalahan kemerosotan nasionalisme tidak hanya dihadapi oleh kaum muda. Ekspresi yang sealur juga terdapat pada lapisan-lapisan masyarakat yang di atasnya. Pada penelitian antropologis Wallach (2002: 80) dari Cornell University juga menemukan gejala xenocentrisme pada penikmat seni di Jakarta. Mereka memandang bahwa seni lokal sebagai kampung dan lebih memilih kesenian Barat. Selain bidang seni, kecenderungan memilih budaya asing dari pada budaya sendiri terlihat pada bidang politik, yaitu pada fenomena munculnya gerakan-gerakan untuk membangun negara Islam, baik dalam bentuk Negara Islam Indonesia maupun menghidupkan kembali sistem kekhilafahan (Wahid, 2009: Bab III).

Di pihak lain, pengaruh “sejarah versi militer” di masyarakat, tidak hanya berhenti pada lahirnya generasi baru yang memiliki kekaguman terhadap tingginya kedisiplinan dan jiwa korsa kaum militer. Warna yang cukup menonjol justru berkembangnya perilaku generasi muda yang memilih menyelesaikan problem dengan

menggunakan kekuatan fisik. Meminjam pandangan Kementerian Pendidikan Nasional yang menengarai bahwa “Dewasa ini, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda, misalnya pada kasus-kasus perkelahian massal. Walaupun belum ada kajian ilmiah bahwa kekerasan tersebut bersumber dari kurikulum, namun beberapa ahli pendidikan dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi kurikulum” (Dokumen Kurikulum 2013: 10). Dari sudut pandang ini, merebaknya organisasi massa yang menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan kekerasan dipahami sebagai akibat dari narasi sejarah yang dipenuhi oleh konflik fisik dan perang.

Pertanyaannya adalah seperti apakah keindonesiaan yang dikonstruksi oleh pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013? Apakah seperti kurikulum sebelumnya yang menguraikan sejarah Indonesia sebagai “sejarah Barat di Indonesia” dan sebagai “sejarah bangsa yang suka perang”? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di bawah ini akan dicoba mengkaji buku teks pelajaran sejarah atau yang sekarang dikenal sebagai buku siswa untuk Kurikulum 2013. Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang tersedia, pada kajian ini akan dibatasi pada buku siswa kelas XI (sebelas).

## B. Buku Siswa Kurikulum 2013

Buku siswa kelas XI semester 1 untuk kurikulum 2013 menguraikan secara kronologis dari kedatangan bangsa Barat sampai dengan masa menjelang berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Pada bab I yang diberi judul “Antara Kolonialisme dan Imperialisme”, penulis menguraikan topik Melacak Perburuan “Mutiar Dari Timur” yang berisi tentang motivasi dan penjelajahan Barat ke dunia baru. Selanjutnya penulis membahas topik “Menganalisis Kemaharajaan VOC” yang berisi perkembangan penjajahan VOC atas Indonesia sampai kebangkrutannya. Pada topik “Mengevaluasi

Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda”, penulis menjelaskan berdirinya Republik Bataaf sampai dominasi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.

Dari uraian pada bab I terlihat dengan jelas bahwa penulis menempatkan Barat sebagai pemeran utama dari seluruh narasi buku teks pelajaran sejarah SMA kelas XI semester 1. Bahkan untuk melayakpantaskan kedudukan Barat, penulis meninggalkan wilayah kajian Indonesia dan menerobos masuk ke sejarah Eropa:

*Bertahun-tahun lamanya Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari Barat dan Timur. Salah satu komoditinya adalah rempah-rempah. Para pedagang dari Barat atau orang-orang Eropa itu mendapatkan rempah-rempah dengan harga lebih terjangkau. Setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Usmani, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah melambung sangat tinggi di pasar Eropa. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Upaya tersebut mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintah dan para ilmuwan. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis juga telah menjadi pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian menyusul Belanda dan Inggris. Tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah tetapi ada tujuan yang lebih luas (Sardiman dkk, XI-1, 2014: 9).*

Secara akademis, sejarawan yang menganalisis kolonialisme di Indonesia dengan merunut sampai ke sejarah Eropa sebagai asal usul, tidaklah menjadi masalah, bahkan dianjurkan. Hal itu terkait dengan pandangan bahwa tindakan para kolonialis di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fenomena historis di Eropa. Akan tetapi, ketika eksplanasi itu digunakan untuk

buku teks pelajaran sejarah, seorang sejarawan perlu mempertimbangkan berbagai hal, antara lain hakekat pendidikan sejarah dan kurikulum.

Pelakuan berbeda diberikan penulis ketika membahas konflik dan perang yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan bangsa Barat. Pada bab II, sub bab 2 yang diberi judul “Maluku Angkat Senjata”, penulis menguraikan sebagai berikut:

*Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore.*

*Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki jung-jung dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan. Maka, wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat (Sardiman dkk, XI-1, 2014: 69).*

Dari kutipan di atas terlihat dengan jelas bahwa penulis tidak berusaha melakukan pelacakan historis tata perdagangan rempah di Maluku menjelang kedatangan bangsa Barat, perubahan tata perdagangan rempah akibat kedatangan bangsa Barat, perjanjian antara Kasultanan Ternate dengan Portugis dan Kasultanan Tidore dengan Spanyol, sampai pada konflik antara Kasultanan Tidore dengan Portugis. Dari sudut pandang ini, penulis buku teks berlaku tidak adil, yaitu mengistimewakan Barat dan menganaktirikan Indonesia. Perlakuan tidak adil penulis buku teks semakin tampak pada tugas terstruktur yang harus dikerjakan siswa,

yaitu: "Coba diskusikan dengan anggota kelompokmu, apa isi Perjanjian Saragosa dan siapa pemrakarsa perjanjian tersebut!" (Sardiman dkk, XI-1, 2014: 70). Dari tugas terstruktur itu, penulis justru dengan sengaja mengarahkan para siswa untuk mendalami sejarah Eropa dan bukan sejarah Indonesia.

Seperti pada bab-bab sebelumnya, pada bab III, meski diberi judul "Membangun Jati Diri Keindonesiaan", penulis tetap saja mengistimewakan Barat. Pada sub bab A, yang berjudul "Menganalisis Tumbuhnya Ruh Kebangsaan dan Nasionalisme", Barat diposisikan sebagai poros dari dinamika historis yang terjadi di Indonesia. Peran besar Barat pada konteks ini diberikan kepada sebuah program yang bernama Politik Etis. Penempatan politik Etis sebagai determinan bagi tumbuhnya nasionalisme dapat disimak antara lain pada uraian penulis di bawah ini:

*... Adanya Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol baru yaitu "kemajuan". Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupanpun mulai mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatiannya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Di samping itu pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.*

*Zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya Barat adalah tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu.*

*...Pengaruh pendidikan Barat itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputra yang memunculkan kesadaran, bahwa rakyat bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual bumiputra itu disebut "priyayi*

*baru" yang sebagian besar adalah guru dan jurnalis di kota-kota. Pendidikan dan pers itu pula menjadi untuk menyalurkan ide-ide dan pemikiran yang ingin membawa kemajuan, dan pembebasan bangsa dan segala bentuk penindasan dari kolonialisme Belanda. Mereka tidak memandang Jawa, Sunda, Minangkabau, Ambon, atau apa pun karena mereka adalah bumiputra. Pengalaman yang mereka peroleh di sekolah dan dalam kehidupan setelah lulus sangatlah berbeda dengan generasi orang tua mereka. Para kaum muda terpelajar inilah yang kemudian membentuk kesadaran "nasional" sebagai bumiputra di Hindia, dan bergerak bersama "bangsa-bangsa" lain dalam garis waktu yang tidak terhingga menuju modernitas, suatu dunia yang memberi makna baru bagi kaum pelajar terdidik saat itu. (Sardiman dkk, XI-1, 2014: 146-147).*

Dari uraian penulis pada kutipan di atas, paling tidak ada dua hal yang menjadi catatan. Pertama, penulis menempatkan kaum muda terpelajar dengan orang tua mereka pada kondisi yang oleh Derrida (1997: 19) disebut sebagai oposisi biner, yaitu dua kutub yang berseberangan, antara modern dengan tradisional. Pada kenyataannya, pemutusan mata rantai sejarah adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Dari sudut pandang ini, meminjam pandangan Giddens (1996: 38), bahwa "*even in the most modernised of modern societies, tradition continues to play a role*".

Dipandang dari sudut wacana yang diproduksi, dengan menempatkannya pada oposisi biner, penulis berusaha mengunggulkan kaum muda terpelajar. Mereka ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kesadaran akan persaingan bersaing dengan bangsa-bangsa lain, ide-ide dan pemikiran untuk kemajuan, serta kesadaran "nasional". Dipihak lain, generasi orang tua mereka dinegasikan sebagai generasi yang "sangatlah berbeda" untuk tidak mengatakan sebagai kebalikan dari generasi kaum muda terpelajar.

Catatan ke dua adalah tentang pilihan penulis buku teks untuk menempatkan politik Etis sebagai determinan bagi lahirnya pergerakan nasional. Disadari atau tidak, penulis menjadi pengikut dari pandangan Robert van Niel yang

menyatakan bahwa semua elite modern Indonesia merupakan hasil didikan Barat atau paling sedikit telah mengadopsi beberapa aspek kebudayaan Barat. Mereka digambarkan sebagai "lebih bersifat Barat dalam pendidikan dan pengajarannya dan dalam konsepsinya mengenai negara dan masyarakat" (Niel, 2009: 43).

Pandangan deterministik menjadikan penjelasan sejarah jauh dari realitas objektif (Purwanto, 2006), karena menempatkan fenomena historis di Indonesia semata hanya sebagai manifestasi dari kebudayaan Barat yang diserap oleh para pelaku sejarah. Ketidakmampuan mendekati realitas objektif paling tampak adalah ketika menempatkan kaum intelektual hasil pendidikan Barat sebagai satu-satunya kelompok yang menjadi pelopor pergerakan nasional dan membentuk negara bangsa seperti Barat sebagai tujuan. Pandangan itu menutup berbagai fenomena sejarah pergerakan nasional, misalnya Sarekat Dagang Islam (SDI), Jamiat Khier dan Perhimpunan Minahasa yang ditinjau dari pendirinya berada di luar proses westemisasi, dalam arti mengikuti pendidikan Barat. Penjelasan Robert van Niel bahwa organisasi SDI disusun oleh Tirtoadisuryo tidak dapat menutupi realitas bahwa kehidupan pendirinya berada di luar lingkaran westemisasi, termasuk di dalamnya alam pemikirannya.

Fenomena historis lain yang tidak mampu diwadahi oleh penulis adalah polemik kebudayaan yang terjadi pada tahun 1935. Polemik itu berawal dari perdebatan dalam kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia di Solo, berkembang menjadi polemik di surat kabar. Polemik memperdebatkan tentang akan seperti apakah kebudayaan Indonesia di masa depan. Sutan Takdir Alisjahbana berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus mengadopsi jiwa kebudayaan Barat. Dia sendirian harus menghadapi tokoh-tokoh pergerakan lainnya yang berpandangan bahwa bangsa Indonesia harus mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan aslinya (Mihardja, 1977). Oleh karena fenomena historis itu bertolak belakang dengan pandangan penulis, maka tidak mungkin mengharapkannya untuk memuat

polemik kebudayaan pada buku teks pelajaran sejarah. Dengan kata lain, peristiwa historis itu ditenggelamkan atau dipandang tidak penting untuk ditulis.

Oleh karena menempatkan Barat pada umumnya dan pemerintah kolonial Belanda pada khususnya sebagai kekuatan determinan, penulis tidak berusaha menggali kebudayaan lokal sebagai habitus bagi lahirnya nasionalisme Indonesia. Struktur lokal, yaitu kondisi sosio-kultural tempat para pelaku sejarah pergerakan nasional dilahirkan dan dibesarkan, cenderung diabaikan atau dipandang sebagai unsur yang tidak memiliki relevansi tinggi untuk dibahas dalam rekonstruksi sejarah nasionalisme Indonesia. Akibatnya, penjelasan yang diberikan tidak mampu membangun koneksi linguistik antara siswa SMA dengan para aktivis pergerakan nasional. Uraian yang dibangun penulis tidak mampu menjadi media yang memadai bagi siswa SMA untuk memahami pemikiran, perasaan dan impian kaum pergerakan nasional. Dengan kata lain, uraian tentang pergerakan nasional yang terdapat dalam buku teks pelajaran sejarah tidak mampu mengungkapkan "history from within" seperti dianjurkan oleh Sartono Kartodirdjo. Fenomena muncul dan berkembangnya nasionalisme menjadi tidak mungkin dipandang sebagai representasi pelaku sejarah dengan seluruh konstruk mentalnya, tetapi harus ditempatkan sebagai akibat tak terduga dari inovasi Barat. Kegagalan itu mengakibatkan terabaikannya keindonesiaan yang seharusnya menjadi roh dari buku teks pelajaran sejarah. Dari sudut pandang ini, adalah sangat sulit bagi mata pelajaran sejarah untuk dapat menunaikan tanggungjawabnya sebagai pewaris keindonesiaan.

Pada buku siswa kelas XI semester 2, uraian sejarah mencakup periode dari pendudukan Jepang sampai dengan kembalinya RIS menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. Hal yang menarik adalah penempatan Jepang pada posisi sama dengan Barat, yang dalam pandangan Derrida disebut sebagai *superior term* (Derrida, 1997: 12). Hal itu terlihat antara lain



penyebutan Jepang sebagai "Saudara tua", seperti pada Bab IV sub bab A yang diberi judul "Menganalisis Awal Pemerintahan "Saudara Tua".

Meski memiliki kesamaan, secara metodologis penulisan pendudukan Jepang berbeda dengan penulisan penjajahan Barat. Ketika membahas penjajahan Barat, penulis menggunakan pendekatan struktural dan membelanjakan cukup banyak energi untuk menelisik motivasi dan penjelajahan ke dunia baru. Sebaliknya, ketika membahas pendudukan Jepang, usaha itu sama sekali tidak tampak. Penjajahan Jepang diuraikan menggunakan pendekatan naratif dengan diawali dari pemboman Pearl Harbour, seperti dikisahkan penulis pada sub-sub bab 1 sebagai berikut:

*Sejak pengeboman Pearl Harbour oleh angkatan udara Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan ke angkatan laut Amerika Serikat di Pasifik. Kemenangan pasukan Jepang seolah-olah tak dapat dikendalikan dan pasukan itu berturut-turut menghancurkan basis militer Amerika. Selain itu, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia muncul dari utara dan timur. Serangan terhadap Indonesia tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak tanah, timah, dan aluminium. Sebab, persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik (Sardiman dkk., XI-2, 2014: 6-7).*

Dari kutipan di atas dapat disimak bahwa penulis tidak tertarik untuk membahas pertanyaan "mengapa", tetapi memfokuskan perhatian pada "bagaimana" suatu fenomena historis terjadi.

Catatan khusus perlu diberikan untuk uraian bab IV, yaitu terkait dengan kebenaran sejarah. Penulis menguraikan:

*Pada pidato sidang BPUPKI, Radjiman menyampaikan pokok persoalan mengenai Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10-11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kata pembukaannya Radjiman Wedyodiningrat meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang*

*membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Sukarno.*

*Dalam sidang pertama, Sukarno mendapat kesempatan berbicara dua kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Radjiman, selama dua hari berlangsung rapat, belum adayang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, pada tanggal 1 Juni pukul 11.00 WIB, Sukarno menyampaikan pidato pentingnya (Sardiman dkk., XI-2, 2014: 60-61).*

Paling tidak ada dua pernyataan yang kebenarannya perlu dipertanyakan. Pertama adalah kalimat terakhir pada alinea pertama, yaitu "Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Sukarno". Pernyataan itu bertentangan atau dalam istilah Ankersmit (1983: 64) sebagai tidak koheren dengan kalimat ke dua dari alinea ke dua, yaitu "Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Radjiman, selama dua hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara". Dari ketidak-koherenan dua kalimat itu, salah satunya pasti tidak benar.

Permasalahan ke dua adalah pernyataan penulis bahwa "Dalam sidang pertama, Sukarno mendapat kesempatan berbicara dua kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945". Pernyataan bahwa "Soekarno mendapatkan kesempatan berbicara dua kali" sungguh unik, karena tidak ada atau paling sedikit belum pernah menemukan sumber yang menyatakan hal itu. Dari sudut pandang ini, pernyataan penulis perlu diuji kebenarannya, untuk tidak mengatakannya sebagai salah.

Pada bab VI, yang diberi judul "Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI, penulis menarasikan "Perkembangan dan Tantangan Awal Kemerdekaan" dalam sub bab A; "Perjuangan Bangsa: Antara Perang dan Damai" dalam sub bab B; dan "Nilai-nilai Kejuangan Masa Revolusi" dalam sub bab C. Dari istilah yang digunakan untuk judul sub bab, seperti menempatkan kata "Perang" lebih dahulu dari pada "Damai" pada sub bab B, serta "Nilai-nilai Kejuangan" pada sub bab C, terlihat bahwa

penulis berpihak pada sejarah militer. Keberpihakan itu semakin jelas ketika membahas tanggapan Indonesia terhadap kedatangan tentara Sekutu dan Nica. Penulis memberi judul sub-sub bab ini "Merdeka atau Mati!" dan membuka uraiannya sebagai berikut:

*Kedatangan Sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia. Apalagi dengan memboncengnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. Bagaimana peristiwa kekerasan akibat kedatangan Sekutu di Indonesia terjadi? Mari kita simak kajian di bawah ini! (Sardiman dkk., XI-2, 2014: 134).*

Dari kutipan di atas tampak bahwa penulis dengan sengaja hanya membahas tanggapan dari "masyarakat" dan "peristiwa kekerasan akibat kedatangan Sekutu". Apakah tidak ada tanggapan dari pemimpin nasional yang duduk di pemerintahan? Jawabnya: ADA. Apakah ada peristiwa yang menunjukkan penentangan terhadap kekerasan? Jawabnya: ADA. Di bawah ini disertakan klipings *Berita Indonesia* terbitan tanggal 5 Desember 1945.



Dari berita koran di atas dapat diambil pemahaman bahwa Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri menyatakan bahwa perundingan merupakan jalan terbaik. Bahkan dia dengan tegas menyatakan bahwa "Kalau Belanda mencoba mendapatkan persetujuan dengan jalan

kekerasan, tidak ada sesuatu persetujuan yang akan terdapat".

Komitmen untuk hanya menggunakan jalan perundingan yang disuarakan oleh para pemimpin nasional Indonesia pada waktu itu tidak akan dapat masuk dalam buku pelajaran sejarah SMA kurikulum 2013, karena penulisnya berpihak atau bahkan, mungkin, mengagungkan penggunaan kekerasan. Pengabaian terhadap komitmen para pemimpin (sipil) nasional itu menjadikan penulis kurang tepat dalam memaknai berbagai fenomena historis periode revolusi kemerdekaan. Salah satunya adalah uraiannya tentang tanggapan para pemimpin nasional terhadap agresi Belanda ke 2:

*Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota, meskipun mereka tahu akan ditawan musuh. Alasannya, agar mereka dengan mudah ditemui oleh TNI, sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Disamping itu, Belanda tidak mungkin melancarkan serangan secara terus menerus, karena Presiden dan wakil Presiden sudah ada di tangan musuh.*

*Sebagai akibat dari keputusan itu, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta beserta sejumlah Menteri, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadarma dan lainnya juga ikut ditawan tentara Belanda (Sardiman dkk., XI-2, 2014: 170).*

Dari kutipan di atas, penulis menarasikan bahwa alasan di balik keputusan untuk menunggu ditangkap Belanda adalah agar: (1) mereka dengan mudah ditemui oleh TNI, (2) Belanda tidak melancarkan serangan secara terus menerus. Alasan-alasan yang disusun penulis lebih merupakan spekulasi atau "kira-kira", sehingga sulit untuk dicarikan bukti primer sebagai pendukung. Meskipun demikian, penulis sudah seharusnya menyadari bahwa buku teks yang disusun adalah untuk pelajar, sehingga perlu mempertimbangkan aspek edukatif. Dari sudut pandang ini, komitmen untuk hanya menggunakan jalan perundingan dan pernyataan Syahrir bahwa "Kalau Belanda mencoba mendapatkan persetujuan dengan jalan kekerasan, tidak ada sesuatu persetujuan yang

akan terdapat" kiranya akan lebih tepat untuk memaknai keputusan penting tersebut.

Catatan kecil yang tidak kalah penting adalah pernyataan penulis bahwa "Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta memutuskan

untuk tetap tinggal di ibukota". Pernyataan itu bertentangan dengan fakta bahwa keputusan itu diambil dalam sidang kabinet yang diadakan secara mendadak (Center of Information Analysis, 2000: 25; Dzulfikriddin, 2010)

### Daftar Pustaka

- Ankersmit, F.R., 1983, *Narrative logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language*. The Hague: Martinus Nijhoff Publisher.
- Center of Information Analysis, 2000, *Kontroversi serangan umum 1 Maret 1949: Polemik tentang Pemrakarsa dan Pelaksana Serangan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum Sejarah 2013*
- Derrida, Jacques. 1997. *Of Grammatology*. Translated by GayatriChakravortySpivak. London: The Johns Hopkins University Press
- Dzulfikriddin, M., 2010, *M. Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Giddens, Anthony, 1996, *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Gismar, A. Malik, "Mencari Indonesia" dalam Komarudin Hidayat dan Putut Wijanarko, peny.. 2008. *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Mizan.
- Kochhar, S.K., 2008, *Teaching History: Pembelajaran Sejarah*. Terjemahan H. Purwanto. Jakarta: Grasindo.
- McGregor, Katharine E.. 2008. *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia
- Mihardja, Achdiat Karta. 1977. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Niel, Robert van. 2009. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan Zahara Deliar Noer. Cetakan kedua. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Purwanto, Bambang. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesia?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Sardiman A.M. dan Amurwani Dwi Lestariningsih, 2014, *Sejarah Indonesia. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sardiman A.M. dan Amurwani Dwi Lestariningsih, 2014, *Sejarah Indonesia. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soekarno, 1965, *Di Bawah Bendera Revolusi*. Cetakan keempat. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Sutherland, Heather. 2008. "Meneliti sejarah penulisan sejarah" dalam Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptani, ed. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wahid, Abdurrachman, ed., 2009, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institut.
- Wallach, Jeremy, 2002, "Exploring Class, Nation and Xenocentrism in Indonesian Cassete Retail Outlet". Artikel pada jurnal *Indonesia* vol. 74 (Oct. 2002), page 79-102. Southeast Asia Program Publications at Cornell University.
- Berita Indonesia*, 5 Desember 1945
- The Jakarta Post*, 16 Agustus 2002